



PEMERINTAH DAERAH PURWAKARTA

RENCANA AKSI 2025

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

RENCANA AKSI TAHUN 2025

SEKRETARIAT DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

[illegible]

[illegible]

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	Pembayaran pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan												
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	Pembayaran pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan												
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Rehdayasos (SLTR)												
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	Pemeliharaan sarana prasarana kantor ac, komputer dan printer												
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Penyediaan sarana dan prasarana makam pahlawan												
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	400	Makam	Renovasi dan perbaikan Makam												



Purwakarta, 14 Januari 2025
Sekretaris Dinas,

NENENG MARYAMAH, S.ST., M.Kes
NIP. 197104041993022002

RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Kodrek	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan Target	Langkah Aksi	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
						Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Daerah Kab/kota											
1		Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan Kemensos mengenai materi sosialisasi								
2		Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Orang	Koordinasi dengan Kemensos mengenai materi sosialisasi								
3		Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	melakukan koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas dan Komda lansia								
4		Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	melakukan koordinas dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial								
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN											
		Kegiatan: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan											
5		Sub . Kegiatan: Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	berkoordinasi dengan Disnakertran, Dinas Sosial Provinsi, Desa/Kelurahan terkait								

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													
6		Sub. Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Orang	Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD serta Desa/Kelurahan								
7		Sub. Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan TKSK dan pihak desa/kelurahan								
8		Sub. Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan PSM dan pihak desa/kelurahan								
9		Sub. Kegiatan: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan								
10		Sub. Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas, Komda lansia, keluarga anak terlantar								
11		Sub. Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas, Komda lansia, keluarga anak terlantar								

12		Sub. Kegiatan: Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan, Disdukcapil								
13		Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	Orang	Koordinasi dengan PSM dan pihak desa/kelurahan, bidang terkait								
14		Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kab/Kota	Orang	koordinasi dengan PSM, TKSK, desa/Kelurahan dan Diskominfo								
15		Sub. Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan IPSM untuk meminta usulan tim reaksi cepat								
16		Sub. Kegiatan : Pemberiaan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	Orang	Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan								
17		Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan Panti swasta di Kab. Purwakarta, Dinsos Prov Jabar dan Kemensos RI								
		Kegiatan : Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											
18		Sub. Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD serta Desa/Kelurahan								

19		Sub. Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	Koordinasi antar perangkat daerah										
----	--	--	--	---------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Purwakarta, 14 Januari 2025
Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Sosial



Dindin Ibrahim Mulyana, S.Ag
NIP. 19741127 201001 1 001

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Sasaran		%	Realisasi dan Target Kinerja								Rencana Aksi	Permasalahan	Tindak Lanjut Rencana Aksi dan Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
			Target	Satuan		TW 1	%	TW 2	%	TW 3	%	TW 4	%				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																	
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Daerah Kab/kota																	
1	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	192	Orang	100%									Koordinasi dengan Kemensos mengenai materi sosialisasi	Kurangnya pemahaman PSM mengenai Puskesmas dan SLRT	melakukan sosialisasi kepada PSM mengenai Peranan PSM dalam pengembangan Puskesmas, pendataan PPKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	192 PSM diberikan Sosialisasi Tentang Puskesmas dan pendataan PPKS
2	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	17	Orang	100%									Koordinasi dengan Kemensos mengenai materi sosialisasi	Kurangnya pembinaan terhadap TKSK	melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di SLRT- Puskesmas	Diberikan sosialisasi tentang peran dan fungsi TKSK dalam Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kecamatan
3	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Keluarga	100%									melakukan koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas dan Komda lansia	Kurangnya perhatian mengenai peringatan hari disabilitas dan Lansia	mengadakan kegiatan peringatan hari lansia serta hari disabilitas	pelaksanaan Peringatan Hari Lansia dan Disabilitas
4	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Lembaga	100%									melakukan koordinas dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pembinaan terhadap lembaga-lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial	mengadakan bimbingan teknis SLRT- Puskesmas, Penguatan Karang Taruna, pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Pelaksanaan sosialisasi tugas dan fungsi SLRT- Puskesmas, peningkatan kemampuan Karang Taruna, LKS dan organisasi sosial lainnya
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN																	
Kegiatan: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal																	
5	Sub . Kegiatan: Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	100%									berkoordinasi dengan Disnakertran, Dinas Sosial Provinsi, Desa/Kelurahan terkait	kesulitan informasi menjangkau warga negara migran korban tindak kekerasan	melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi mengenai warga negara migran tersebut	pemulangan warga negara migran korban kekerasan ke kelurahan/desa asal dari titik debarkasi

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																	
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																	
6	Sub. Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	200	Orang	100%									Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD serta Desa/Kelurahan	kesulitan dalam penjangkauan penerima manfaat	Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD, LKSA, Desa/Kelurahan untuk menjangkau penerima manfaat	menyalurkan bantuan permakanan
7	Sub. Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100%									Koordinasi dengan TKSK dan pihak desa/kelurahan	kesulitan dalam menjangkau penerima manfaat	melakukan koordinasi dengan TKSK dan pihak desa/kelurahan untuk menjangkau penerima manfaat	menyalurkan bantuan sandang
8	Sub. Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	55	Orang	100%									Koordinasi dengan PSM dan pihak desa/kelurahan	ketidaklengkapan data pengajuan serta penerima manfaat banyak yang meninggal	melakukan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap calon penerima manfaat	menyalurkan alat bantu sesuai hasil verifikasi
9	Sub. Kegiatan: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	100%									Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan	kesulitan dalam menjangkau penerima manfaat	melakukan reunifikasi penerima manfaat dan keluarga	mereunifikasi penerima manfaat dengan keluarga
10	Sub. Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	100%									koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas, Komda lansia, keluarga anak terlantar	tidak memiliki kapasitas untuk memberikan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	melakukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kapasitas dalam memberikan pemahaman mengenai bimbingan Fisik, mental, spiritual dan sosial	terlaksananya kegiatan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial
11	Sub. Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	75	Orang	100%									koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas, Komda lansia, keluarga anak terlantar	kurangnya pemahaman keluarga dalam memberikan edukasi kepada penerima manfaat	melakukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kapasitas dalam memberikan pemahaman mengenai bimbingan sosial	terlaksananya kegiatan pemberian bimbingan sosial
12	Sub. Kegiatan: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	100%									Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan, Disdukcapil	kesulitan dalam menjangkau penerima manfaat	melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dalam pengurusan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas anak	terfasilitasinya pengurusan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas anak

13	Sub.Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	100%											Koordinasi dengan PSM dan pihak desa/kelurahan, bidang terkait	tidak memiliki wewenang dalam mengakses sistem informasi pengajuan penerima manfaat	berkoordinasi dengan bidang terkait dalam pengusulan bantuan pendidikan maupun kesehatan	penerima manfaat mendapatkan akses layanan pendidikan melalui KIP dan akses kesehatan melalui KIS yang dibiayai pemerintah
14	Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kab/Kota	25 Orang	100%											koordinasi dengan PSM< TKSK, desa/Kelurahan dan Diskominfo	belum memiliki hotline pengaduan	membentuk hotline pengaduan yang terintegrasi dengan SLRT dan Puseksos	terlayannya pengaduan data dari masyarakat
15	Sub. Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100%											Koordinasi dengan IPSP untuk meminta usulan tim reaksi cepat	belum adanya tim reaksi cepat dalam penanganan kedaruratan	membentuk tim reaksi cepat untuk merespon masalah layanan kedaruratan	merespon secara tepat dan tanggap mengenai layanan kedaruratan
16	Sub. Kegiatan : Pemberiaan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	100%											Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan	kesulitan dalam menjangkau penerima manfaat	menelusuri keluarga penerima manfaat	penerima manfaat mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga
17	Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100%											Koordinasi dengan Panti swasta di Kab. Purwakarta, Dinsos Prov Jabar dan Kemensos RI	tidak adanya panti milik pemerintah Kabupaten Purwakarta	melakukan rujukan penerima manfaat sesuai dengan kategori penerima manfaat	penerima manfaat dirujuk sesuai dengan kategorinya
Kegiatan : Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																		
18	Sub. Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100%											Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD serta Desa/Kelurahan	kesulitan dalam penjangkauan penerima manfaat	Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD, LKSA, Desa/Kelurahan untuk menjangkau penerima manfaat	menyalurkan bantuan perbekalan kesehatan
19	Sub. Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	30 Dokumen	100%											Koordinasi antar perangkat daerah	belum optimalnya pelaksanaan SLRT dan Puskesmas	melakukan sosialisas mengenai SLRT dan Puskesmas	terjalannya kerjasama antar lembaga dan kemitraan

Purwakarta, 14 Januari 2025
Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Sosial



1.06.06.2.01.01	-Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	25	25	50	50	75	75	100	100
1.06.06.2.01.02	-Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	18	25	35	50	53	75	70	100
1.06.06.2.01.03	- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	1	100	1	100	1	100	1	100
1.06.06.2.01.04	- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	8	25	15	50	23	75	30	100
1.06.06.2.01.04	- Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	8	25	15	50	23	75	30	100
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana SDM TAGANA dan Lumbung Sosial	Dokumen	1									
1.06.06.2.02.01	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	Koordinasi dengan Lintas Sektor, stakeholder bencana dan TAGANA	1	100	1	100	1	100	1	100
1.06.06.2.02.02	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	25	100	25	100	25	100	25	100



Indikator

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Sasaran		%	Realisasi dan Target Kinerja								Rencana Aksi	Permasalahan	Tindak Lanjut Rencana Aksi dan Upaya Mengatasi	Keterangan
			Target	Satuan		TW 1	%	TW 2	%	TW 3	%	TW 4	%				
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (KPM PKH)	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten / kota	27405	KK	100	27405	100	27405	100	27405	100	27405	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan SDM Fasilitator Bansos, Pihak Bank Himbara dan agen penyalur	Kurang berjalannya pemutakhiran data KPM	Kurang berjalannya pemutakhiran data KPM	Berkoordinasi dengan lintas sektor seperti pendamping dengan operator SIKS-NG di Desa / Kelurahan agar data dapat termutakhirkan
	SDM PPKH		70	ORANG	100	70	100	70	100	70	100	70	100				
	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	345000	ORANG	100	86250	25	172500	50	258750	75	345000	100	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Koordinasi dengan operator desa / kelurahan agar memadankan data dan memverifikasi data meninggal serta non aktif
	PBI APBN		354.906	ORANG	100	354.906	100	354.906	100	354.906	100	354.906	100	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Koordinasi dengan operator desa / kelurahan agar memadankan data dan memverifikasi data meninggal serta non aktif
	PBI APBD		95579	ORANG	100	95579	100	95579	100	95579	100	95579	100	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Koordinasi dengan operator desa / kelurahan agar memadankan data dan memverifikasi data meninggal serta non aktif
	SDM Operator Data Fakir Miskin (17 Kecamatan x 12 Bulan)		17	ORANG	100	17	100	17	100	17	100	17	100				
	SDM Operator Data Fakir Miskin (175 Kecamatan x 4 Bulan)		175	ORANG	100	175	100	175	100	175	100	175	100				

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (PKH + BPNT)	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten / kota	102038	KK (Keluarga)	100	102038	100	102038	100	102038	100	102038	100	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan, Pendamping PKH	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, data non aktif, juga verifikasi ketidaklayakan yang masih kurang update	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, data non aktif, juga verifikasi ketidaklayakan yang masih kurang update	Koordinasi dengan operator desa / kelurahan agar memadankan data dan memverifikasi data meninggal serta non aktif
	SDM Pengelola Data Fakir Miskin (2 orang x 12 Bulan)		2	ORANG	100	2	100	2	100	2	100	2	100				
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten / kota	20	ORANG	100	20	100	20	100	20	100	20	100	Koordinasi dengan lintas sektor, Perangkat Desa / Kelurahan maupun Kecamatan yang terdapat PPKS (WRSE) yang memiliki potensi usaha			
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana															
	Layanan Kebencanaan																
	- Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100	25	25	50	50	75	75	100	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	Gudang logistik yang kurang memadai, Logistik terbatas, lumbung sosial hanya ada di 4 Kecamatan	Gudang logistik yang kurang memadai, Logistik terbatas, lumbung sosial hanya ada di 4 Kecamatan	Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan PSKBA Kemensos RI untuk minta buffer stock tambahan serta lumbung sosial tambahan
	- Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70	Orang	100	18	25	35	50	53	75	70	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	Gudang logistik yang kurang memadai, Logistik terbatas, lumbung sosial hanya ada di 4 Kecamatan	Gudang logistik yang kurang memadai, Logistik terbatas, lumbung sosial hanya ada di 4 Kecamatan	Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan PSKBA Kemensos RI untuk minta buffer stock tambahan serta lumbung sosial tambahan
	- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Unit	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	terjadinya bencana bersifat aksidental (tidak dapat di prediksi) + Terdampak refocusing (pemotongan anggaran 10 jt)	Terjadinya bencana bersifat aksidental (tidak dapat di prediksi) + Terdampak refocusing (pemotongan anggaran 10 jt)	Koordinasi dengan BPBD, TAGANA, dan pengelola lumbung sosial untuk siaga bencana

- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	100	8	25	15	50	23	75	30	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	KK yang tidak dilampirkan di surat permohonan	KK yang tidak dilampirkan di surat permohonan	Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk melampirkan KK
- Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	100	8	25	15	50	23	75	30	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	KK yang tidak dilampirkan di surat permohonan	KK yang tidak dilampirkan di surat permohonan	Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk melampirkan KK
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kampung	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor, stakeholder bencana dan TAGANA	Untuk membangun KSB diperlukannya SK Bupati dan kesiapan dari masyarakat / kampung / kecamatan untuk mengajukan KSB	Untuk membangun KSB diperlukannya SK Bupati dan kesiapan dari masyarakat / kampung / kecamatan untuk mengajukan KSB	Koordinasi dengan Kecamatan Rentan Bencana terkait Pembentukan Kampung Siaga Bencana
SDM Pengelola Lumbung Sosial 3 Orang x 4 Lumbung		12	Orang	100	12	100	12	100	12	100	12	100				
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	100	25	100	25	100	25	100	25	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	Kurangnya anggota TAGANA di Kabupaten Purwakarta (belum mewakili Kecamatan) minimal 2 personil per kecamatan.	Kurangnya anggota TAGANA di Kabupaten Purwakarta (belum mewakili Kecamatan) minimal 2 personil per kecamatan.	Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kemensos direktorat PSKBA untuk pra syarat pengajuan personil TAGANA baru

Purwakarta, 14 Januari 2025
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin,

EKA PRATIYATI NINGSIH, S.ST., M.KES.
NIP. 19850717 200304 2 005



RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Kodrek	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target	Langkah Aksi	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
							Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota												
1	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Koordinasi dan Konsultasi untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	48.000.000	100	-	-	-	-
2	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	30	Koordinasi dan Konsultasi untuk Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	30,694,000	68,21	7,890,000.00	17,53	2,996,000.00	6,66	3,420,000.00	7,60
3	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Orang	30	Koordinasi dan Konsultasi untuk Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota			50,000,000	100				
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota												
4	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Koordinasi dan Konsultasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			75,000,000	100				
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
5	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	Koordinasi dan Konsultasi Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota			55,000,000	100				

	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA															
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
6	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Koordinasi dan Konsultasi Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota						50,000,000	100				
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
7	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	5	Koordinasi dan Konsultasi untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota			18,563,000	26,52	16,443,000	23,49	34,994,000	76,60			
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK															
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
8	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	Koordinasi dan Konsultasi untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota						37,000,000	82,22	3,000,000	30,40		



Purwakarta, 14 Januari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
ROCHMAWATI, M.Pd.
NIP. 19700923 199601 2 001

RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Kodrek	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target	Langkah Aksi	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
							Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
I	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	100									
1	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupate/Kota	Dokumen	1									
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupate/Kota	Dokumen	1	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

5	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Orang	100												
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Orang	100	1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Program Kerja Forum Anak Kabupaten Purwakarta 2. Melaksanakan Kegiatan Workshop Forum Anak Kabupaten Purwakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

H. DIDY SUARDI, S.H., M.Si.
NIP. 19660525 198803 1 008

Purwakarta, 14 Januari 2025
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Hj. Rd. Heni Hendrayani, S.H., M.M.
NIP. 19671108 199302 2 001